

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Pada penelitian skripsi ini penulis sangat tertarik membahas politik dan ekonomi pada jaman keshogunan Tokugawa karena Zaman Edo atau sering juga disebut masa Tokugawa adalah zaman yang sangat berpengaruh bagi Jepang modern, bukan hanya karena zaman ini adalah satu masa sebelum Restorasi Meiji yang menjadi gerbang modernisasi di Jepang, tetapi karena pada masa ini unsur-unsur budaya Jepang berkembang dengan pesat. Berbagai kemajuan Jepang dicapai pada masa ini, mulai dari lahirnya berbagai bentuk kesenian sampai sistem perekonomian yang maju, masyarakatnya pun tidak hanya mengalami kemajuan, tetapi juga menjadi landasan terbentuknya masyarakat Jepang modern. Atas dasar alasan itulah, maka penelitian skripsi ini mengambil judul: **Politik Luar Negeri Jepang di Era Pemerintahan Keshogunan Tokugawa.**

B. Latar Belakang Masalah

Jepang Modern seperti di masa sekarang, merupakan Negara dengan sistem pemerintahan yang tersusun rapi. Dengan Kaisar sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Dengan sistem pemerintahan yang mengadopsi dari negara-negara barat seperti Inggris dengan sistem parlemennya. Walaupun terdapat juga sisi keasliannya yang

menunjukkan identitas Jepang yaitu penetapan kaisar sebagai pemimpin Negara hingga sekarang. Meskipun demikian, dapat dilihat dalam sejarah era Tokugawa, dimana terdapat sistem pemerintahan yang terpisah dengan kekaisaran, dan itu dapat menjadi cikal bakal dari sistem pemerintahan Jepang sekarang yang tentunya lebih disempurnakan pada masa sekarang. Selain itu, Jepang modern juga mengadopsi sistem ekonomi liberal. Jepang merupakan Negara Asia yang disebut-sebut sebagai pesaing Negara barat. Pernyataan itu tidaklah beralasan, Jepang mampu menjadi Negara modern pertama diluar Negara barat. Pencapaian itu berkaitan dengan keberhasilan Jepang di bidang Ekonomi yang mendukung terwujudnya pendidikan yang merata. Tidak hanya pada sektor politik dan militer, Jepang juga mampu melaksanakan modernisasi di berbagai aspek lainnya, seperti pada aspek ekonomi dan pendidikan. Peristiwa modernisasi di Jepang tidak lepas dari latar belakang sejarah. Dan era yang menjadi latar belakang dimulainya perkembangan modernisasi di Jepang yaitu pada era Keshogunan Tokugawa, karena di masa Keshogunan Tokugawa merupakan awal mula Jepang berhubungan dengan bangsa barat. Selain itu, aspek politik dan ekonomi juga berkembang dengan pesat.

Keshogunan Tokugawa (1603 - 1868) atau Keshogunan Edo (Edo bakufu) adalah pemerintahan militer feodalisme di Jepang yang didirikan oleh Tokugawa Ieyasu dan secara turun temurun dipimpin oleh shogun keluarga Tokugawa. Dalam periode historis Jepang, masa pemerintahan Keshogunan Tokugawa disebut zaman Edo, karena ibukota terletak di Edo yang sekarang

disebut Tokyo. Keshogunan Tokugawa memerintah dari Istana Edo hingga Restorasi Meiji.

Keshogunan Tokugawa adalah pemerintahan militer ketiga dan terakhir di Jepang setelah Keshogunan Kamakura dan Keshogunan Muromachi. Keshogunan Tokugawa dimulai pada tanggal 24 Maret 1603 dengan pengangkatan Tokugawa Ieyasu sebagai Sei-i Taishogun dan berakhir ketika Tokugawa Yoshinobu mengembalikan kekuasaan ke tangan kaisar Taisei Hoken pada 9 November 1867.

Pemerintahan keshogunan Tokugawa selama 264 tahun disebut sebagai zaman Edo atau zaman Tokugawa. Di masa Keshogunan Tokugawa, rakyat Jepang dibagi-bagi menurut sistem kelas berdasarkan pembagian kelas yang diciptakan Toyotomi Hideyoshi sebagai kebijakan dalam negeri untuk mengatur politik domestik agar kondusif. Kelas samurai berada di hirarki paling atas, diikuti petani, pengrajin dan pedagang.

Dalam struktur atau susunan masyarakat Jepang, khususnya pada awal-awal kekuasaan Shogun Tokugawa, kedudukan golongan pedagang/pengusaha berada pada posisi paling bawah. Dibandingkan dengan golongan petani dan golongan tukang (termasuk pandai besi), golongan pedagang kurang mendapat kehormatan. Hal ini terjadi karena masyarakat Jepang lebih menuntut adanya etika ksatria, sedangkan pada golongan pedagang etika ini sangat kurang. Di samping itu masyarakat Jepang melihat

bahwa golongan pedagang dalam menjalankan perdagangan terlalu banyak mengambil untung, sehingga merugikan rakyat kebanyakan.¹

Namun dalam perkembangannya, golongan pedagang dapat memaksimalkan peranannya bagi penguasa keshogunan. Dan golongan pedagang memberikan dampak positif pada perekonomian di Jepang pada masa itu.

Hubungan Jepang paling awal dengan Cina membawa pengaruh sangat besar pada seluruh sejarah budaya dan lembaga-lembaga di negeri itu. Kemudian setelah beberapa waktu datanglah bangsa barat pertama yaitu Portugis. Pada saat itulah mulai muncul imperialisme di Jepang. Imperialisme mengandung pengertian yaitu perluasan daerah kekuasaan atau jajahan untuk mendirikan kekaisaran atau imperium. Atau dengan kata lain imperialisme adalah suatu sistem penjajahan langsung dari suatu negara terhadap negara lain, yang bertujuan untuk kepentingan negara penjajah. Dari pengertian imperium itulah muncul pengertian imperialisme dan yang melaksanakan adalah imperator.

Berdasarkan waktu, imperialisme dibedakan menjadi dua yaitu kuno dan modern. Imperialisme kuno berlangsung sebelum revolusi industri dengan tujuan *Gold, Glory* dan *Gospel*. Imperialisme modern berlangsung setelah terjadinya revolusi industri dengan mementingkan masalah ekonomi. Sifat dari kedua imperialisme di atas adalah sama, hanya sistemnya yang berbeda. Sifat hakikinya berupa nafsu serakah untuk mendapatkan kekayaan. Kekayaan

¹ Hane, M. 1986. *Modern Japan. A Historical Survey*. Boulder, Colorado : Westview Press, 172.

yang dikejar pada masa imperialisme kuno biasanya berwujud emas atau logam mulia lainnya misalnya perak. Sistem yang mendukungnya adalah penguasaan di mana dalam prakteknya melakukan monopoli, kerja paksa dan sebagainya. Sedangkan pada imperialisme modern didukung oleh industrialisme serta perdagangan bebas, serta upah buruh yang sangat minim, tanpa memiliki hak dalam produksi.

Pada tahun-tahun awal abad ke-16, utusan-utusan yang dikirimkan ke Cina dalam pandangan Jepang lebih banyak berguna untuk tujuan perdagangan. Sebagian besar pelayaran bertolak dari Jepang di bawah perlindungan tuan-tuan tanah. Kapal-kapal yang ikut dalam pelayaran, biasanya tiga buah, berukuran kecil, dan lebih dari separuh penumpang yang dibawanya para pedagang yang membayar sewa ruang untuk barang. Barang-barang yang mereka bawa untuk hadiah istana Ming terdiri atas bahan mentah, dan hasil kerajinan tangan Jepang seperti kipas dan tabir pembatas ruang, barang-barang dari *lacquer*, pedang dan baju besi. Barang-barang tambahan yang harus ditawarkan terlebih dahulu kepada pemerintah Cina, tetapi dapat kemudian ditawarkan di pasar terbuka jika ditolak, mencakup kapur barus, belerang, dan biji tembaga / biji tembaga akhir-akhir ini menjadi barang yang makin penting.²

Sementara itu, bangsa-bangsa Eropa mulai berdatangan ke Asia. Setelah Portugis berhasil di Goa dan Malaka, Portugis mulai mengirim armada kapalnya ke perairan Cina pada tahun 1514, tetapi hampir tiga puluh tahun

² Beasley, *Pengalaman Jepang*, Yayasan Obor, Jakarta, 2003, hlm. 170.

kemudian (1542 atau 1543) serombongan orang Portugis sampai di Tanegashima, sebuah pulau di sebelah selatan Teluk Kagoshima.³

Mereka datang menumpang sebuah kapal Cina. Setelah itu kapal-kapal Portugis sendiri mulai berdatangan ke Kyushu, tetapi baru setelah Cina mengizinkan Portugis mendirikan pemukiman di Macao (1557) dan seorang tuan tanah feodal Jepang menempatkan Nagasaki sebagai pelabuhan dagang, maka pola perdagangan yang teratur mulai muncul. Sejak itu, kedua pelabuhan ini berperan sebagai terminal perdagangan tetap antara Cina dan Jepang, menggunakan kapal-kapal Portugis.

Tidak lama kemudian Belanda sudah menjadi pesaing orang Portugis di seluruh perairan Asia, pertama kali dibawa ke Jepang oleh sebuah kapal dan tiba di Jepang pada tahun 1600, tetapi berhasil mendirikan sebuah kantor perdagangan di Hirado (di barat laut Kyushu) pada tahun 1609.⁴

Kedatangan bangsa-bangsa Eropa tidak semata hanya berdagang mencari kekayaan dan kejayaan tapi diantara mereka juga ada yang bertujuan menyebarkan agama yaitu agama Kristen. Mereka adalah bangsa Spanyol dan Portugis. Kapal dagang selain membawa awak kapal juga terdapat pendeta-pendeta yang bertujuan untuk menyebarkan agama. Pada mulanya kegiatan mereka dibiarkan. Tetapi setelah beberapa waktu, ternyata penyebaran agama Kristen dirasa membawa pengaruh buruk dan bertentangan dengan kebijakan Keshogunan Tokugawa.

³ *Ibid.*, hlm. 172.

⁴ *Ibid.*, hln. 175.

Pada tanggal 24 Juli 1587, Toyotomi Hideyoshi mengeluarkan keputusan memerintahkan pendeta Kristen meninggalkan Jepang. Isi dari keputusan itu diawali dengan kata-kata yang sudah berabad-abad digunakan, “Jepang adalah tanah dewa-dewa (kami)”. Dari sini kata-kata berikutnya langsung menuduh para pendeta itu sebagai penghasut penyerangan atas biara dan kuil, dan penghasut “lapisan masyarakat bawah” untuk melanggar hukum. Kehadiran mereka karena itu merupakan ancaman bagi ketertiban umum.

Munculnya pesaing, baik dari Eropa maupun dari Jepang sendiri, Portugis kehilangan monopoli barang impor dari Cina yang berada dalam tangannya selama ini. Orang Spanyol, Belanda, dan Inggris semuanya turut ambil bagian dalam membawa barang impor dari Cina. Demikian pula dengan perdagangan dengan kapal dari Jepang sendiri. Kapal-kapal Cina di Nagasaki, dan kapal-kapal Jepang dari Tsushima dan Pusan, merupakan sumber-sumber baru persediaan barang. Dari semua ini, orang Portugis dan Spanyol memiliki hubungan dengan penyebaran agama Kristen. Dengan pertimbangan-pertimbangan ini, Hidetada dan Lemitsu merasa bebas untuk mengambil sikap lebih ketat mengendalikan kegiatan perdagangan luar negeri. Pada tahun 1616 Hidetada melarang perdagangan di pelabuhan-pelabuhan selain dari Nagasaki dan Hirado, membatalkan izin yang lebih longgar yang diberikan kepada orang Inggris sebelumnya.⁵

Sebenarnya banyak kapal-kapal dagang dari Barat yang mendesak untuk berlabuh di pelabuhan Jepang agar pelabuhan Jepang dibuka sebagai

⁵ Beasley, *Pengalaman Jepang*,.....op.cit., hlm. 176.

pelabuhan persinggahan dan perdagangan seperti kapal dagang VOC, kapal Portugis, Belanda, Inggris, dan kapal-kapal dari negara lainnya. Masuknya pedagang asing di Jepang pada masa pemeritahan Keshogunan Tokugawa juga membawa dampak tersendiri bagi keadaan domestik dan mempengaruhi eksistensi Keshogunan Tokugawa sebagai penguasa Jepang. Akan tetapi Keshogunan Tokugawa melakukan upaya-upaya mempertahankan eksistensinya. Hanya kapal dagang dari Belanda saja yang diperbolehkan untuk berlabuh di pelabuhan pulau Dejima. Dengan demikian, karena semakin berkurangnya kapal-kapal asing yang masuk ke Jepang maka menjadi indikasi bahwa Keshogunan Tokugawa berhasil menjaga eksistensinya.

C. Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan utama permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah menjawab pertanyaan: Bagaimana Keshogunan Tokugawa dalam menjaga eksistensinya pada masa imperialisme barat?

D. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui Bagaimana Keshogunan Tokugawa dalam menjaga eksistensinya pada masa imperialisme barat.
2. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dampak politik luar negeri Jepang yang diterapkan oleh Keshogunan Tokugawa khususnya di bidang sosial dan politik.

3. Penelitian ini ditujukan sebagai informasi kepada pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan wawasan tentang dinamika sistem politik Keshogunan Tokugawa yang terpisah dari kekaisaran Jepang.

E. Kerangka Teoritis

Dalam melihat permasalahan di atas, setidaknya ada beberapa pemikiran, baik teori maupun konsep yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pokok permasalahan yang muncul dan juga akan membantu dalam memilih konsep-konsep yang tepat bagi pembentukan hipotesa. Kata *teori* berasal dari bahasa Yunani yang artinya melihat atau memperhatikan. Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa teori adalah pandangan atau persepsi tentang apa saja yang terjadi, menjelaskan mengapa itu terjadi, dan mungkin juga meramalkan kemungkinan berulangnya kejadian itu di masa depan⁶.

Untuk mendeskripsikan jawaban dari rumusan masalah yang telah diungkapkan diatas, penulis menggunakan konsep sebagai alat bantu. Konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat suatu obyek, atau suatu fenomena tertentu.⁷ Kerangka dasar teori adalah sarana untuk menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini. Penulis menggunakan konsep nasionalisme, konsep kaisar keturunan dewa dan konsep politik luar negeri, untuk menjawab permasalahan tersebut.

⁶ Mochtar Mas'ood, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, hlm. 185.

⁷ *Ibid.*

1. Konsep Nasionalisme

Nasionalisme merupakan suatu bentuk ideologi. Sebagai suatu ideologi, nasionalisme membangun kesadaran rakyat sebagai suatu bangsa serta memberi seperangkat sikap dan program tindakan. Tingkah laku seorang nasionalis didasarkan pada perasaan menjadi bagian dari suatu komunitas bangsa.⁸

Kata “nation” yang berasal dari kata lain nasci yang berarti “lahir”, mulai digunakan pada abad ke-13 untuk mengidentifikasi sekelompok orang yang mempunyai kesamaan berdasarkan kelahiran ataupun ciri-ciri fisik lainnya. Baru pada abad ke-18 istilah nasionalisme menjadi lebih politis dan inklusif. Austin Barel, menggunakan kata nasionalisme untuk pertama kalinya pada tahun 1789. Terinspirasi oleh pemikiran Jean Jaques Rousseau mengenai “*general will*” dan “*popular sovereignty*” juang rakyat Prancis yang digambarkan sebagai pemegang kedaulatan Prancis, untuk melawan rezim Louis XVI. Sejak saat itulah nasionalisme dalam konteks gerakan perlawanan terhadap penguasa menjelma menjadi doktrin dan kredo politik yang sangat kuat dan berpengaruh. Pada perkembangan selanjutnya nasionalisme menyebar ke Asia dan Eropa dalam bentuk perlawanan terhadap kolonialisme.

Menariknya, karakter nasionalisme bisa berubah karena berbagai faktor politik. Ketika nasionalisme dipahami sebagai reaksi perlawanan terhadap dominasi unsur lain maka ia memiliki karakter liberalis atau

⁸ Bellah, R.N. 1992. *Religi Tokugawa. Akar-akar Budaya Jepang*. Jakarta : Karti Sarana dan Gramedia Pustaka Sarana, hlm. 4.

sebagai pembebas dalam konteks kemerdekaan, keadilan dan demokrasi. Dalam buku *Political Ideologies: An Introduction*, Andrew Heywood mengatakan bahwa ini merupakan konsep nasionalisme yang paling tua seperti yang diilustrasikan pada masa Revolusi Prancis saat liberalisme dan nasionalisme seakan tidak dapat dipisahkan. Pada situasi kompetisi dan persaingan internasional, saat tumbuh ketidakpercayaan, ketakutan ataupun kebencian terhadap negara lain, nasionalisme kemudian mempunyai karakter chauvinis-ekspansionis. Nasionalisme jenis ini tidak lagi mengakui persamaan kebebasan bagi seluruh individu atau kelompok, melainkan hak-hak atas dasar kualitas suatu bangsa, untuk menguasai bangsa lain. Jingoism kemudian menjadi ungkapan yang kerap digunakan untuk menggambarkan naluri dan antusiasme masyarakat yang meluap-luap dalam mendukung kegiatan-kegiatan ekspansi dari negaranya. Aktivis nasionalis-sayap kanan Prancis Charles Maurras (1868-1952) menyebut paham ini dengan istilah “*integral nationalism*”, yaitu identitas individu dan kelompok melebur ke dalam suatu negara yang sangat kuat dan berpengaruh.

Rasa kebangsaan (*nationalism*) dan cinta tanah air (*patriotism*) ibarat dua anak kembar yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Kedua hal tersebut erat kaitannya dengan perasaan senasib yang dimiliki oleh suatu kumpulan masyarakat (*society*) pada suatu tempat. Menurut Benedict Anderson, perasaan seperti ini menjadi sesuatu yang *imagined*, artinya orang-orang tersebutlah yang mendefinisikan mereka sendiri

sebagai warga suatu bangsa, meski tidak pernah saling mengenal, bertemu atau bahkan mendengar. Namun dalam suatu pikiran mereka hidup suatu image mengenai kesatuan bersama. Pikiran atau perasaan seperti itulah yang seringkali kemudian menimbulkan adanya pengorbanan jiwa dan raga dari anggota masyarakat tersebut bagi bangsa dan negaranya.⁹

Nasionalisme di Jepang pada era Keshogunan Tokugawa digambarkan dengan masyarakat yang tradisional, yang loyalitasnya terhadap negaranya didasarkan pada nilai-nilai tradisional antara lain mitos masyarakat yang percaya bahwa kaisar Jepang adalah keturunan dewa, dan hal tersebut harus dilestarikan dan dijaga. Perasaan senasib dan sebangsa, juga tempat tinggal yang sama memperkuat nasionalisme masyarakat terhadap Jepang pada masa itu. Namun demikian, hal tersebut menjadi landasan Jepang pada masa kini untuk memberikan identitas bangsa. Bahwa bangsa Jepang menghargai sejarah bangsanya.

2. Konsep Kaisar Keturunan Dewa

Ajaran Shinto yang secara harfiah berarti *jalan para dewa* Shin. Shinto mulai dikenal pada periode Yayoi (300 SM). Shinto adalah agama asli orang Jepang pada masa lampau dan masih dilaksanakan sampai saat ini dengan dilakukan banyak modifikasi terutama karena pengaruh dari ajaran Budha dan Konghucu. Agama Budha masuk ke Jepang melalui China dan Korea pada abad ke-6, dan yang sangat luar biasa adalah

⁹ Benedict Anderson, *Imagined Communities, Reflections of the Origin and Spread of Nationalism*, Rourledge, 2001, hlm. 224.

terdapatnya para dewa-dewi Shinto yang masuk sebagai dewa-dewi agama Budha dan begitu pula sebaliknya. Konsep ajaran Shinto adalah pemujaan kepada para dewa, arwah para leluhur, arwah para binatang, para dewa pelindung, dan arwah alam (lima unsur). Dewa-dewi mengacu pada keagungan, kekeramatan, spiritual, dan keajaiban dari sifat atau energi dari suatu tempat dan benda, makhluk gaib dari mitologi lokal maupun kerajaan, roh-roh dari alam dan tempat, para pahlawan yang dipuja, leluhur, penguasa dan negarawan.¹⁰

Salah satu dewa-dewi yang cukup terkenal adalah Dewi Matahari Sinto, yaitu *Amaterasu Omikami* yang merupakan ratu seluruh dewa-dewi dan merupakan anak dari *Izanagi* dan *Izanami* (Dewa Pencipta menurut mitologi Jepang). Rakyat Jepang percaya dan yakin bahwa kekaisaran Jepang adalah keturunan langsung dari Dewi Amaterasu, yaitu Amaterasu-Mikoto-Ninigi-Jimmu. Kaisar Jimmu adalah cicitnya Dewi Amaterasu dan merupakan kaisar pertama Jepang. Keturunan Kekaisaran Jimmu (600 SM – 300) diantaranya adalah Kekaisaran Yamato (300-645), Kekaisaran Asuka (645-710), Kekaisaran Nara (710-784), Kekaisaran Heinan (794-1185), Kaisar Meiji (1868-1912), Kaisar Taisho (1912-1926), Kaisar Showa (1926-1989), hingga Kaisar Heisei saat ini (1989-sekarang). Oleh karena itu konsep Kaisar Jepang sebagai keturunan para dewa bukan isapan jempol belaka, sedemikian sehingga sangat tidak mungkin para

¹⁰ Nichiyu Iwama, (Kepala Bhiksu Kuil Minobusan Kuon-Ji) (alih bahasa Sidin Ekaputra), 2007, *Nichiren Shonin di Pertapaan Gunung Minobu*, Perhimpunan Buddhis Nichiren Shu Indonesia, Jakarta.

keshogunan Jepang berani menghancurkan dan merebut kekaisaran walaupun secara militer lebih mampu dan lebih kuat¹¹.

Pada saat Minamoto Yoritomo (1185) mendirikan pemerintahan di luar kekaisaran, dengan segera membuatkan kuil di luar Ise dan menjadikan distrik Tojo sebagai tempat kediaman sang Dewi Amaterasu. Konon karena telah memenuhi keinginan sang dewi tersebut, kemudian Minamoto direstui sang dewi menjadi *shogun* seluruh Jepang (mitologi Jepang)¹².

Kepercayaan bangsa Jepang terhadap kekaisaran sebagai wujud keturunan para dewa (ajaran Shinto) membuat setiap keshogunan merasakan harus menjaga dan melanggengkan kelangsungan hidup kekaisaran. Keshogunan bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, sebagai garda terdepan pertahanan dan keamanan negara, serta bertanggung jawab pula dalam urusan hubungan internasional terutama dengan pihak-pihak China dan Korea. Kaisar adalah lambang pemersatu dan bapak bangsa serta hanya berperan di bidang seni budaya dan keagamaan. Pembagian kekuasaan ini pun merupakan salah satu strategi keshogunan pada waktu itu. Apabila penguasa keshogunan berani menghapus kekaisaran, maka akan menanggung akibatnya, yaitu perlawanan rakyat yang tidak mungkin bisa diredam dan diatasi, bahkan akan berbahaya bagi kelangsungan kekuasaan keshogunan itu sendiri¹³.

¹¹ Hall, John Whitney, 1978, *Japan: From Prehistory to Modern Times*, Charles E. Tuttle Company, Tokyo.

¹² Nichiyu Iwama, *Loc.Cit.*

¹³ Hall, John Whitney, *Loc.Cit.*

Nilai-nilai tradisional seperti mitos kaisar keturunan dewa dan ajaran-ajaran Shinto yang ada di masyarakat Jepang waktu itu dapat memupuk nasionalisme yang besar terhadap Jepang. Dengan demikian Keshogunan Tokugawa dapat melestarikan nilai-nilai tradisional yang efektif sebagai alat pemersatu dan penguat nasionalisme. Sehingga Keshogunan Tokugawa dapat menjaga eksistensinya pada masa imperialisme barat. Dan juga menjadikan identitas nasional dan internasional bagi Jepang di masa sekarang.

3. Konsep Politik Luar Negeri

Politik luar negeri adalah suatu kebijakan strategi suatu negara terhadap negara lain yang dijalankan untuk merealisasikan kepentingan nasional (*National Interest*). Jack C Plano & Roy Olton menyatakan bahwa: *Foreign Policy is a strategy or planned course of actions developed by the decisions maker of a state vis a vis other state or international entities, aimed at achieving specific goals defined in term or national interest.*¹⁴

Menurut Jack Plano dan Roy Olton politik luar negeri bertujuan untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional, serta memenuhi kebutuhan utama suatu negara. Dengan kata lain politik luar negeri merupakan langkah nyata dalam guna mencapai, mempertahankan dan melindungi kepentingan suatu negara tersebut.

¹⁴ Jack C Plano & Roy Olton, *The International Relations Dictionary : Third Editions*, Western Michigan University, ABC-Clio, California United States, 1982. hlm. 168.

Salisbury and Gibson dalam bukunya *The Road of Foreign Policy* menyatakan bahwa, politik luar negeri adalah suatu bentuk sarana dalam mengejawantahkan kepentingan dalam negeri yang diperoleh atas hubungan luar negeri/kawasan atau organisasi internasional. Politik luar negeri bukan merupakan hal yang sederhana, namun didasarkan pada suatu rencana yang komprehensif yang dibuat secara sistematis atas dasar pengetahuan dan pengalaman dari momentum-momentum sebelumnya. Politik luar negeri, dapat menjalankan berbagai cara dalam rangka memberikan peningkatan dan perlindungan terhadap kepentingan bangsa.¹⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, politik luar negeri adalah sarana suatu bangsa dalam merealisasikan kepentingan nasionalnya melalui mekanisme interaksi dengan negara, kawasan atau organisasi internasional. Dalam perkembangan atau situasi khusus, berbagai bentuk upaya dapat diaplikasikan dalam rangka peningkatan dan perlindungan kepentingan nasional suatu bangsa.

Politik luar negeri suatu negara terkait oleh beberapa faktor yaitu faktor kepentingan nasional (*National Interest*), Pengambilan Keputusan (*Decisions Making*) dan Orientasi politik luar negeri (*Orientations of Foreign Policy*). Ketiga faktor tersebut merupakan faktor yang krusial,

¹⁵ Salisbury and Gibson, dikutip dari Dahlan Nasutions, *Politik Internasional (Konsep dan Teoritis)*, Penerbit PT Erlangga, Jakarta, 1989, hlm. 26

yang merupakan elemen pembentuk politik luar negeri. Elemen-elemen ini sangat menentukan mekanisme politik luar negeri itu sendiri.¹⁶

1. Kepentingan nasional (*National Interest*), merupakan bentuk kemampuan suatu bangsa dalam memperoleh suatu pencapaian yang sebelumnya telah diagendakan suatu negara, dalam merealisasikan nilai-nilai kepentingan nasional suatu negara harus menyesuaikan dengan kemampuan yang dengan sendirinya akan menunjukkan seberapa jauh intensitas dalam kepentingan nasional itu sendiri.
2. Pengambilan Keputusan (*Decisions Making*), dalam konteks ini adalah wujud tindak lanjut dalam mendukung mekanisme kepentingan nasional, pengambilan keputusan juga bisa difungsikan sebagai media antisipasif, perlindungan dan perolehan. Dengan demikian pengambilan keputusan mempunyai peranan vital bagi keberhasilan dan efektifitas politik luar negeri suatu negara.
3. Orientasi politik luar negeri (*Orientations of Foreign Policy*) dalam konteks ini adalah wujud tindak lanjut dari pengambilan keputusan. Dalam tahap ini interaksi antara negara dengan negara atau aktor internasional, sudah berada pada tahap intens. Tingkat keberhasilan orientasi politik luar negeri dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, kondisi domestik negara yang bersangkutan, kapabilitas ekonomi-politik dan militer negara tersebut dan konteks internasional.¹⁷

¹⁶ Mohtar Masoed, *Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 2006. hlm. 158.

¹⁷ Mohtar Masoed, *loc. cit.*

Dalam konsep ini, politik luar negeri Jepang pada masa Keshogunan Tokugawa adalah politik pintu tertutup atau politik isolasi. Untuk mewujudkannya maka diperlukan keadaan domestik yang menunjang sehingga politik luar negeri itu dapat berjalan dengan baik. Pemerintahan Jepang pada masa Keshogunan Tokugawa melakukan kontrol yang ketat guna terwujudnya keadaan domestik yang menunjang, baik dalam bidang politik ataupun ekonomi. Antara lain dengan menciptakan sistem kelas sosial di masyarakat dan sistem pemerintahan yang baik. Dengan terciptanya kondisi domestik yang baik maka penguasa Keshogunan dapat dengan mudah mengambil kebijakan politik luar negerinya yaitu politik isolasi. Dengan berjalannya politik isolasi, sedikit demi sedikit kemudian imperialisme asing dapat dihambat dan Keshogunan Tokugawa dapat menjaga eksistensinya.

F. Hipotesa

Hipotesa merupakan pernyataan singkat yang disimpulkan dari kerangka pemikiran dan merupakan jawaban sementara terhadap persoalan yang akan diteliti, sehingga harus dibuktikan kebenarannya:

Jepang pada era Keshogunan Tokugawa menjaga eksistensinya pada masa imperialisme barat adalah dengan melestarikan nasionalisme tradisional dan kebijakan politik luar negeri Jepang yaitu, politik isolasi.

G. Jangkauan Penulisan

Dalam rangka memberi batasan agar penulisan skripsi ini tidak meluas dan mengalami kerancuan, maka penulis memberi batasan penulisan skripsi ini hanya pada jaman Keshogunan Tokugawa (1603-1869), dipilih rentang waktu ini karena pada era ini mampu mencakup segala peristiwa penting politik luar negeri keshogunan di Jepang. Jangkauan di luar tahun tersebut sedikit disinggung selama masih ada keterkaitan dan kerelevanan terhadap topik yang sedang dibahas.

H. Metode Pengumpulan Data dan Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sistem analisis kualitatif melalui metode penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data sekunder. data pengamatan terhadap obyek dikumpulkan melalui penelitian pustaka (*library research*). Teknik ini digunakan untuk menganalisa data yang bersumber dari buku-buku, majalah dan surat kabar, artikel dan jurnal hubungan internasional laporan penelitian, *internet* atau *website*.

I. Sistematika Penulisan

Bab 1 Pendahuluan

Pendahuluan merupakan bab yang menguraikan mengenai pokok-pokok penting dalam penulisan sebuah skripsi, yang meliputi: alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, perumusan

masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab 2 Sejarah Jepang Era Keshogunan Tokugawa

Bab ini berisi mengenai awal mula pemerintahan Keshogunan Tokugawa sampai dengan keruntuhan pemerintah Tokugawa.

Bab 3 Hubungan Jepang Dengan Pihak Asing

Bab ini berisi mengenai kedatangan imperialsime asing di Jepang untuk pertama kali mulai dari Cina, Portugis, Belanda hingga Inggris sampai dengan keberhasilan Jepang mengusir imperialisme.

Bab 4 Penentu Keberhasilan Jepang Menjaga Eksistensi pada Masa Imperialisme Barat

Bab ini berisi hal-hal yang berkenaan dengan faktor-faktor yang mendorong Jepang pada era keshogunan tokugawa berhasil menjaga eksistensi pada masa imperialisme asing, terdapatnya nasionalisme tradisional dan politik isolasi pada masa keshogunan Tokugawa.

Bab 5 Penutup

Berisi kesimpulan dari keseluruhan bab dan saran-saran penulis bagi mereka yang berkepentingan.